

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu visi pada masa kepemimpinan Joko Widodo tahun 2014-2019 adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) yang dicapai melalui sebuah gagasan yaitu diplomasi maritim. Visi ini menggambarkan mengenai kondisi dimana kekuatan geopolitik dan ekonomi saat ini sedang bergerak dari Barat berpindah ke Asia (BBC, 2014). Diplomasi maritim adalah mengatur hubungan antar dua negara atau lebih di sektor maritim. Menurut Miere (2014), diplomasi maritim tidak hanya membicarakan tentang penggunaan diplomasi sebagai cara menyelesaikan konflik antar negara, tapi juga termasuk terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya maritim. Umumnya, diplomasi melibatkan diplomat sebagai aktor representasi negara, diplomasi maritim melibatkan *policy maker* dan akademisi untuk mengkaji perkembangan dan permasalahan yang terjadi di dunia internasional. Presiden Jokowi mengatakan bahwa “melalui diplomasi maritim, ia ingin mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bekerja sama di bidang kelautan, sehingga Indonesia bisa menyelesaikan konflik laut” (Widodo, 2014).

Diplomasi maritim menjadi salah satu cara untuk mewujudkan Indonesia menjadi PMD. PMD adalah agenda pembangunan Indonesia yang disampaikan saat forum *East Asia Summit* ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014 dimana untuk pertama kalinya visi ini disampaikan di dunia internasional. Terdapat lima pilar sebagai upaya Indonesia untuk mewujudkan PMD. Pertama, reinternalisasi nilai-nilai dan pelaksanaan budaya maritim. Kedua, melakukan pengelolaan sumber daya laut dengan mengembangkan industri-industri perikanan dan menjadikan nelayan sebagai garda utama. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, menjalin dan meluas kerjasama melalui diplomasi maritim untuk menghilangkan dan menyelesaikan sengketa maritim. Sedangkan pilar kelima adalah memperkuat pertahanan maritim (Indonesia, 2019).

Namun hingga akhir masa periode pertama kepemimpinan Jokowi (2019), visi PMD banyak dikritik pelbagai pihak. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menganggap bahwa visi ini tidak tentu arah. Mereka menilai meski banyak lompatan besar dalam pemberantasan *illegal fishing* namun di sisi lain, justru kebijakan yang terjadi menghilangkan ruang hidup dan hak konstitusional masyarakat pesisir (Kiara.or, 2017). Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Andriana Elisabeth (2017) menyatakan bahwa diplomasi di sektor maritim masih belum dilaksanakan secara optimal. Perlu adanya pelaksanaan diplomasi maritim yang lebih modern dan mengalami pembaruan. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, R Sjarief Widjaja (2019) juga mengkritik, bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat pelbagai masalah, seperti *illegal fishing*, terjadinya penurunan minat nelayan, dan tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi. Selain itu peneliti sejarah maritim, Azyumardi Azra (2016) menilai bahwa pembangunan poros maritim di Indonesia itu masih jauh panggang dari api. Konsep yang hanya terkesan bagus, namun dalam pembangunannya tidak ada.

Untuk menguji kritik-kritik diatas, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi komitmen pemerintahan Jokowi terhadap diplomasi maritim selama periode pertama kepemimpinannya. Penelitian-penelitian terdahulu tentang diplomasi maritim sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya hanya menjelaskan definisi dan jenis diplomasi maritim (Rijal, 2019), tentang isi dan pelaksanaannya (Harry dan Arfin, 2016), tantangan diplomasi maritim (Darmastuti dan Emmy, 2015) atau mengenai hubungan Indonesia dengan negara lain terkait PMD (Nanto, 2018). Melihat penelitian sebelumnya, masih belum ada yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi berhasil atau tidaknya diplomasi maritim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaruan dalam sisi akademis dan bisa berkontribusi secara praktis dalam penerapan kebijakan luar negeri Indonesia terkait diplomasi maritim untuk periode kepemimpinan Presiden selanjutnya.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan:

1. Apakah diplomasi maritim Indonesia pada periode pertama Jokowi memberikan dampak signifikan bagi Poros Maritim Dunia?

2. Bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan diplomasi maritim dalam mencapai Poros Maritim Dunia?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus yang diuraikan sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan luar negeri berdasarkan konsep diplomasi maritim.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan luar negeri Indonesia yaitu diplomasi maritim dalam mencapai PMD.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis, terutama terkait ilmu hubungan internasional dalam konsep kebijakan luar negeri. Secara lebih lanjut penelitian dapat dijadikan referensi dan bahan pembandingan bagi peneliti lain terkait topik PMD.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelbagai pihak, seperti menjadi bahan evaluasi Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan luar negerinya di periode yang akan datang serta dapat menjadi referensi bagi pembaca atau pembuat kebijakan untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

## **1.5.Kerangka Pemikiran**

Pada Subbab ini kerangka pemikiran yang digunakan sebagai alat menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep diplomasi maritim yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1.5.1 Kebijakan Luar Negeri**

Pasca Perjanjian Westphalia dan Perang Dunia Pertama dan Kedua, sistem internasional mulai berubah, terbentuknya model negara bangsa yang kemudian menghasilkan interaksi antar negara. Kedaulatan setiap negara mulai terbentuk sehingga terciptanya kebijakan luar negeri, yang bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi keputusan, strategi, dan akhir interaksi suatu negara dengan negara yang lain. Melihat banyaknya pengertian dari kebijakan luar negeri mengakibatkan banyaknya cara pandang akademisi dalam mengartikan hal tersebut. Menurut George Modelski (1962), dalam bukunya "*A Theory of Foreign Policy*", kebijakan luar negeri merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh suatu negara dan bertujuan untuk mengubah perilaku negara lain disesuaikan dengan kondisi domestik negaranya di lingkup internasional, sehingga tujuan negaranya bisa tercapai. Melihat definisi tersebut, artinya secara mendasar, kebijakan luar negeri merupakan perumusan dari masalah yang terjadi pada lingkup domestik dan dikaitkan dengan kondisi internasional, pada akhirnya kebijakan luar negeri digunakan agar kepentingan nasional suatu negara bisa tercapai. Sedangkan Kebijakan Luar Negeri menurut Mark R. Amstutz (2013) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik secara eksplisit dan implisit dan bertujuan untuk mempromosikan kepentingan nasional di luar batas teritorial suatu negara. Menurut Holsti (1992) kebijakan luar negeri adalah segala perilaku negara terhadap lingkungan eksternalnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan tersebut. Namun tidak dipungkiri juga bahwa kondisi domestik juga sangatlah mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Lentner (1974), dalam bukunya "*Foreign Policy Analysis*" bahwa kebijakan luar negeri terletak pada aspek domestik dan juga internasional. Hal ini disebutkan oleh Lentner sebagai *domestic determinants* dan juga *foreign*

*determinants*. *Foreign determinants* mengacu pada keadaan sistem internasional dan situasi pada saat kebijakan itu berlangsung, sedangkan determinan domestik menunjuk pada keadaan di dalam negeri, seperti: geografi, jumlah penduduk, sumber daya alam, kepemimpinan politik, budaya politik, sikap dan persepsi, serta kondisi domestik saat itu. Istilah muncul dari Henry Kissinger (dalam Rosyidin, 2019), seorang akademisi serta praktisi politik luar negeri Amerika Serikat, mengatakan bahwa “*foreign policy begins when domestic policy ends*”. Menurutnya, politik luar negeri mencakup aspek dalam negeri (domestik) dan aspek internasional (eksternal).

Secara umum kebijakan luar negeri merupakan tujuan dan tindakan dilakukan oleh pemerintah dan menyangkut urusan eksternal, terutama hubungan dengan negara asing. Berbeda dengan definisi lainnya yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri diambil dari kondisi negara atau domestiknya, Hermann mendefinisikan bahwa kebijakan luar negeri sebagai tindakan sengaja yang terpisah dan dihasilkan dari keputusan politik seseorang atau sekelompok individu, kebijakan bukan merupakan sebuah keputusan, melainkan hasil dari sebuah keputusan. Sehingga, ada aktor yang memutuskan sebuah kebijakan, bukan murni dari sebuah negara. Pada akhirnya, kebijakan luar negeri tercipta dari banyak faktor, keadaan domestik, lingkungan internasional, dan bahkan aktor yang melakukan *decision-making*.

Meski begitu kebijakan luar negeri kerap sulit didefinisikan secara jelas, karena kebijakan luar negeri terkesan abstrak dan tidak terlihat. Dalam pelaksanaannya terus dikaitkan bahwa tujuan nasional merupakan penggabungan kepentingan nasional suatu negara (Morgenthau, 1997). Untuk merealisasikan sebuah program atau kebijakan, kebijakan luar negeri dikategorisasi menurut tujuan pembuatannya. Pertama adalah kebijakan programatik, kebijakan ini dirancang observasi secara komprehensif dengan melihat faktor yang berpengaruh secara menyeluruh untuk tujuan yang lebih luas dan berjangka panjang. Kedua, kebijakan krisis, merupakan kebijakan yang diputuskan secara langsung dan bersifat tidak terencana. Sehingga terdapat aspek spekulasi dalam kebijakan tersebut. Ketiga, kebijakan politik, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya bisa dire-

evaluasi, direvisi, dan dibatalkan setiap saat diperlukan (Dougherty & Platzgraf. Ir. 1986). Dalam hal itu bisa diperlihatkan juga bahwa sebuah kebijakan luar negeri juga terkesan sesuatu yang fleksibel di sesuaikan dengan kondisi eksternal dan internal dalam suatu kurun waktu. Proses hingga muncul sebuah kebijakan pun juga membutuhkan hubungan yang rumit dan kompleks antara elit politik, situasi kondisi eksternal dan internal, kekuatan nasional dan pada akhirnya disesuaikan dengan apa yang diinginkan suatu negara berupa tujuan nasional.

Dalam implementasi suatu kebijakan, perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang penting. Perumusan masalah ditujukan untuk membantu para analis kebijakan dalam menentukan penyebab suatu masalah, memetakan tujuan, hingga pada cara yang tepat untuk menentukan kebijakan (Dunn, 1999). Tahapan ini menjadi landasan dan penentu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Perumusan atau formulasi kebijakan dilakukan agar pembuatan kebijakan tepat sasaran dan bisa dilaksanakan dan berdampak secara maksimal. Patton dan Sawicki dalam Subarsono (2005) memberikan beberapa tahap hingga perumusan kebijakan, yaitu, mencari penyebab, memberikan batasan masalah, mengumpulkan data, melakukan perumusan tujuan, identifikasi, hingga mencapai sebuah kebijakan.

Salah satu bentuk tindakan lanjutan yang dihasilkan dari sebuah kebijakan luar negeri adalah diplomasi. Diplomasi berkaitan dengan pengelolaan hubungan antar negara, apabila dilihat melalui persektif negara, diplomasi berkaitan dengan menasihati, membentuk dan menerapkan kebijakan luar negeri. Sehingga, dengan begitu kepentingan nasional suatu negara bisa tercapai.

### **1.5.2. Diplomasi**

Diplomasi merupakan seni dan praktik negosiasi yang dilakukan perwakilan negara atau sebuah organisasi (Kemlu, 2010). Diplomasi biasanya dikaitkan dengan isu dan hubungan internasional yang mengurus beberapa aspek seperti budaya, ekonomi, pertahanan dan perdagangan. Istilah “*diplomacy*” dikenal dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke (1776) yang diambil dari bahasa Prancis yaitu “*diplomatie*”. Pada dasarnya, diplomasi adalah kegiatan politik dengan sumber daya yang terampil. Tujuannya untuk menjaga dan mengamankan

kebijakan luar negeri suatu negara tanpa terpaksa, propaganda, atau hukum. Sehingga, diplomasi terdiri dari komunikasi antara aktor negara yang mempromosikan kebijakan luar negeri baik dilakukan dengan perjanjian atau bisa disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing negara. Menurut G.R. Berridge (2010), diplomasi didefinisikan sebagai tindakan politik yang dilakukan oleh negara dengan tujuan mencapai dan mempertahankan kepentingan negara melalui negosiasi, propaganda, hukum dan tanpa adanya tindak kekerasan. Salah satu turunan agar diplomasi bisa tercapai adalah munculnya propaganda. Propaganda adalah manipulasi opini publik melalui media massa untuk tujuan politik. Mungkin bisa dilebih-lebihkan, kurang jujur atau bahasa yang diperhalus dan diarahkan untuk mencapai perubahan pendapat jangka panjang, bukan jangka pendek.

Diplomasi merupakan sarana yang digunakan negara melalui perwakilan formal untuk mengartikulasikan, mengoordinasikan dan mengamankan kepentingan tertentu dengan cara korespondensi, pembicaraan pribadi, pertukaran pandangan, lobi, kunjungan, ancaman dan kegiatan terkait lainnya. Sir Ernest Satow (1952) mengartikan Diplomasi sebagai suatu penerapan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi dan bertujuan untuk memperluas hubungan antara pemerintah negara. Sedangkan menurut Kautilya (dalam Jayanti, 2014), diplomasi ditujukan untuk mengamankan kepentingan negara sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa diplomasi menjadi sebuah instrumen atau untuk tercapainya tujuan nasional suatu negara.

Diplomasi merupakan relasi, hubungan, komunikasi dan keterkaitan antar negara. Diplomasi adalah hasil dari proses komunikasi dua arah antar negara untuk mencapai kebijakan luar negeri masing-masing negara. Meskipun diplomasi terlihat sebagai sesuatu yang damai, diplomasi juga dapat terjadi dalam kondisi perang dan berhubungan dengan militer karena fungsi utama diplomasi adalah melakukan perubahan dengan cara melakukan persuasi secara masif dan berkelanjutan di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung. Dengan berjalannya zaman maka diplomasi selalu berubah-ubah, diplomasi lama kini menjadi sesuatu yang baru dan bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya

pemerintah yang berperan sebagai aktor, atau hal ini bisa disebut *multi-track diplomacy*. *Multi-track* diplomasi adalah konsep yang digunakan dalam melakukan perdamaian dunia internasional. *Multi-track* diplomasi dilakukan untuk mencapai peran negara dalam sebagai *peacemaking* dan *peacebuilding*. Komponen diplomasi ini terdiri dari kegiatan, individual, institusi, dan komunikasi yang saling bekerjasama sehingga tercapainya perdamaian dunia (Diamond & Mc. Donald, 1996). Melihat hal tersebut, aktor dalam diplomasi tidak lagi negara namun menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Inti dari diplomasi adalah kesepakatan negara untuk saling memberi dan menerima sehingga akan tercapai hubungan antar dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Hubungan ini terbentuk berjalan dengan kepentingan nasional suatu negara, bisa terkait budaya, teknologi, agama, salah satunya adalah maritim. Dalam mencapai visi PMD maka Indonesia meningkatkan hubungan antar negara serta pengelolaan sumber daya alamnya menggunakan strategi diplomasi maritim.

### **1.5.1. Diplomasi maritim**

Secara konsep, diplomasi maritim memiliki definisi yang berbeda dari pelbagai pihak. Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, diplomasi maritim dilakukan sebagai bentuk pengoptimalan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional (Luhut, 2019). Sedangkan menurut Miere (2014), diplomasi maritim tidak hanya untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara sebagaimana disampaikan oleh Luhut, tetapi juga tentang pengelolaan dan penggunaan sumber daya maritim untuk mengatur hubungan antar negara. Diplomasi maritim biasanya tidak dimaksudkan untuk mengarah pada perang, tetapi lebih kepada untuk bersekutu dan menyaingi kebijakan sehingga kapabilitas keamanan dapat tercapai. Diplomasi maritim tetap menjadi alat yang unik dan berguna bagi angkatan laut dan pemerintah di seluruh dunia.

Konsep diplomasi maritim dan pelaksanaannya akan menimbulkan banyak perbedaaan interpretasi. Diplomasi maritim merupakan sebuah implementasi dari



kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan asset maritime demi tercapainya kepentingan nasional sesuai dengan kebijakan nasional dan hukum internasional yang berlaku (Windratmo, 2018). Menurutnya, diplomasi maritim juga tidak hanya serta merta mengenai pengelolaan dan pengembangan sumber daya maritim, tetapi juga mengenai pertahanan maritim dan pembangunan infrastruktur. Negara maritim akan tercapai jika perekonomian negara meningkat di bidang maritim dengan melakukan cara-cara tersebut. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa diplomasi maritim nantinya bertujuan untuk menjaga kondisi nasional yang berfokus pada isu keamanan maritim (Nugraha & Sudirman, 2016). Diplomasi ini juga tidak selalu mengenai batas-batas laut antar negara, gencatan senjata dengan angkatan militer, atau mengenai negosiasi internasional tentang isu maritim. Namun juga mengenai bagaimana kerjasama bilateral dan multilateral di bidang maritim, penggunaan sumber daya maritim, dan pengembangan sipil serta militer di wilayah maritim. Diplomasi maritim bertujuan untuk mempengaruhi perilaku negara lain di wilayah perairan. Meskipun saat ini diplomasi maritim lebih condong kepada hal yang berbentuk non-militer, kerjasama dan negosiasi, pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk mencegah tindakan negara lain kepada suatu negara melalui ancaman dalam konteks militer. Sehingga, dengan cakupan yang luas dalam diplomasi maritim, baik militer maupun non-militer, Miere mengklasifikasikan diplomasi maritim menjadi tiga yaitu, diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif.

Diplomasi maritim kooperatif adalah diplomasi yang melibatkan banyak aktor dan aktivitas. Diplomasi ini merupakan bentuk kerja sama antar aktor yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar negara di sektor maritime, sehingga diplomasi ini bisa juga disebut sebagai *soft maritime diplomacy* karena tidak menggunakan instrumen militer dan mengedepankan kerjasama, seperti pertukaran anggota militer, program pendidikan, pertemuan kolaboratif, dan lainnya yang bertujuan untuk *confidence-building*. Selanjutnya diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga pada akhirnya diplomasi ini mempengaruhi bagaimana pihak lain memandang suatu negara.

Salah satu caranya adalah *showing the flag*, yaitu dengan mengibarkan bendera pada kapal sebagai penanda kehadiran negara di suatu wilayah kedaulatan negara. Terakhir, diplomasi maritim koersif, merupakan diplomasi maritim yang menggunakan kekuatan militer atau *maritime forces* untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Diplomasi maritim koersif ini mencakup kegiatan terkait gencatan senjata seperti penembakan, penyerangan, penyeragaman, terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran di wilayah lautnya. Diplomasi ini juga disebut sebagai *hard maritime diplomacy*.

Meski secara umum diplomasi maritim terklasifikasi pada ketiga konsep tersebut, tentu pelaksanaannya akan selalu berbeda. Anak Agung dan Ivena Ersandi menganalisis bagaimana pelaksanaan diplomasi maritim yang dilakukan Jepang-Filipina pada tahun 2017, yang dibentuk dalam suatu konsep *Strengthened Strategic Partnership*. Diplomasi maritim ini dilakukan antar kedua negara untuk bekerjasama di bidang maritim dan dirumuskan pada beberapa tindakan seperti perjanjian dan pernyataan bersama, kontribusi dan koordinasi di wilayah regional, hubungan bilateral berupa latihan bersama dan kunjungan, sistem pinjaman untuk saling membangun kebutuhan maritim masing-masing negara, dan pertukaran militer. Sehingga diplomasi maritim dilaksanakan untuk meningkatkan pengaruh diplomatik dan memperkuat hubungan antar negara yang pada akhirnya dapat mencapai keamanan maritim dan pengembangan sumber daya maritim. Konsep diplomasi maritim Indonesia untuk mencapai PMD dirumuskan pada 4 pilar pelaksanaannya yaitu, pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur laut dan kerjasama dengan negara-negara di sektor maritim (Kemlu, 2015).

## **1.6.Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

Dalam menganalisis data untuk mencapai hasil penelitian, penelitian ini menggunakan definisi konseptual berupa pelaksanaan pilar-pilar diplomasi maritim sebagai berikut:

1. Pilar pertama adalah membangun kembali budaya maritim dengan melakukan budi daya perikanan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan

kearifan lokal, pelayaran rakyat, pariwisata, dan olah raga bahari. Pada konsepnya, pilar ini melakukan revolusi mental pada jatidiri bangsa dalam meneguhkan kesadaran lingkungan maritim, sehingga dalam implementasi hendaknya didukung oleh sumber daya manusia bahari yang andal atau disebut sebagai *people to people connectivity*. Kekuatan maritim akan meningkat dengan penguatan budaya maritim baik dalam hal kelestariann kearifan lokal dan wisata bahari, seperti gerakan makan ikan atau peningkatan wisata bahari berupa panorama pantai, laut, dan pulau.

2. Pilar kedua adalah melakukan pengelolaan sumber daya laut dan membangun kedaulatan pangan laut dengan melakukan industri perikanan, dimana pada pilar ini nelayan menjadi garda utama. Pengelolaan yang dimaksud berarti berdaulat, berkelanjutan, dan menciptakan kesejahteraan. Hal-hal yang dimaksud adalah terkait penegakan hukum di laut seperti *Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian mutu, keamanan hasil ikan, penangkapan secara ramah lingkungan, dan peningkatan produktivitas, sehingga mempengaruhi daya saing produk hasil kelautan. Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang dimaksud juga untuk kemakmuran masyarakat melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi. Pilar ini sejalan dengan konsep diplomasi maritim koersif karena melibatkan instrumen militer dan menjaga kedaulatan negara, yaitu pelaksanaan penenggelaman kapal sebagai hukuman masuknya kapal ilegal ke wilayah Indonesia. Nugraha & Sudirman juga memberikan dua cara dalam diplomasi maritim salah satunya adalah pilar ini, yaitu mengembangkan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan optimal melalui kebijakan industri maritim yang terintegrasi. Hal ini akan menyebabkan terpenuhinya industri bahan dasar yang akhirnya akan memperkuat pertahanan maritim sehingga tercapai stabilitas kawasan.

3. Pilar ketiga adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim yang diimplementasikan dengan pembangunan tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Pembangunan infrastruktur laut diharapkan membantu konektivitas antar pulau dan daerah sehingga memudahkan

perdagangan dan mobilisasi logistik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konektivitas maritim bertujuan untuk membenahi aspek ekonomi. Keunggulan daya saing maritim Indonesia secara internasional akan tercapai, jika daya saing maritim di kawasan kota dan kawasan pesisir dalam negeri sudah meningkat. Ide tentang tol laut pada dasarnya adalah mewujudkan konektivitas pelayaran yang efektif dan efisien untuk menciptakan *freight cost* yang murah dan aman serta menyeimbangkan jarak geografis terhadap jarak ekonomis.

4. Pilar keempat adalah memperluas dan meningkatkan kerjasama melalui diplomasi maritim untuk menyelesaikan sengketa laut. Salah satunya adalah melakukan hubungan kerjasama maritim antar negara melalui organisasi, seperti keterlibatan Indonesia pada hubungan bilateral dan multilateral seperti IORA (Indian Ocean Rim Association) dan EAS (East Asia Summit). Hal ini dilakukan untuk menghadapi keterbukaan global dan pasar bebas, sehingga akan membantu posisi strategis Indonesia. Pilar ini sejalan dengan pelaksanaan diplomasi maritim kooperatif karena mengedepankan kerjasama dan peran pihak lain, sehingga pengembangan konektivitas ini berpengaruh secara luas bagi kepentingan nasional baik secara ekonomi, politik-keamanan, dan sosial budaya. Hubungan bilateral lain yang memungkinkan terjadi adalah bidang militer laut, baik persenjataan maupun latihan militer, hal ini tentunya akan merevitalisasi dan mengembangkan bagian pertahanan dan keamanan maritim. Untuk menjadi negara maritim, Indonesia harus menambah kekuatan militer dalam pertahanannya, bukan hanya tentang pengelolaan tapi juga pertahanan.

Diplomasi maritim yang diimplementasikan pada beberapa pilar bertujuan untuk mencapai negara maritim yang kuat, mandiri, maju dan berdaulat. Negara maritim yang kuat didasari oleh beberapa kriteria, yaitu, negara yang berdaulat atas dan disegani atas wilayahnya, memiliki kekuatan laut yang kuat baik secara nasional maupun global, serta mampu mengelola sumber daya dan memanfaatkan potensi maritim untuk melakukan pembangunan maritim (Kusumastanto, 2014). Definisi negara maritim yang kuat juga dinyatakan oleh Deputi Kedaulatan Maritim, Arif Havas Oegrosono (2016), bahwa negara maritim yang kuat bisa tercapai dengan pemanfaatan jalur laut, bukan lagi tentang isi laut. Salah satu

contohnya adalah Singapura, tidak memiliki laut dan sumber daya laut, namun menjadi salah satu dari 12 negara maritim terbesar di dunia. Sedangkan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Yudo Margono (2020), faktor negara maritim yang kuat didukung dari beberapa elemen, yaitu, kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter nasional bangsa dan pemerintahannya (Kompas, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa, untuk bisa mencapai visi PMD Indonesia perlu mencapai banyak komponen, tidak hanya kondisi geografis dan luas wilayah.

Berdasarkan definisi mengenai diplomasi maritim diatas, definisi konseptual digunakan sebagai alat untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam pencapaian PMD.

## **1.7. Metodologi Penelitian**

### **1.7.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penulis melakukan analisis mendalam pada data yang telah didapatkan peneliti dan kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan. Kriyantono (2016) menyatakan bahwa, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mengumpulkan data-data terkait. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang dimiliki dalam sebuah penelitian. Alasan seorang peneliti menggunakan metode ini dikarenakan adanya kemungkinan peneliti untuk melakukan eksplorasi dalam memahami suatu fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan dan analisis data. Menurut McCusker dan Gunaydin (2015), metode kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” terhadap suatu fenomena.

### **1.7.2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan *online research* untuk melengkapi dan menunjang data dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data primer berupa wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak dan instansi yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian ini melakukan wawancara terhadap 4 narasumber, narasumber pertama adalah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi untuk mencari data secara

teoritis dan faktual mengenai pelaksanaan diplomasi maritim ini, kemudian narasumber kedua adalah Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengenai dampak kebijakan yang diterima, dan narasumber ketiga adalah wawancara terhadap Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai institusi yang melakukan penelitian terhadap kebijakan analisis dan strategis terkait politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga diharapkan akan mendapat cara pandang baru terkait evaluasi pelaksanaan diplomasi maritim.

### **1.7.3. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjawab pertanyaan “bagaimana” atau menjelaskan fenomena yang ada berdasarkan hasil analisis dari data yang sudah dikumpulkan. Sehingga, pada penelitian ini mengambil beberapa data yang kemudian dilakukan analisis untuk melihat fenomena-fenomena tersebut kemudian dikaitkan dengan konsep yang ada, kemudian muncul analisis berupa sebab-akibat dan penjelasan secara deskriptif.

### **1.8. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini dibagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti kemudian rumusan masalah yang diajukan penulis dan juga teori yang hendak digunakan sebagai alat analisis. Pada bab ini juga memuat rancangan desain penelitian yang tercantum dalam subbab metodologi penelitian.
- b. BAB II: Bab ini berisikan deskripsi mengenai pelaksanaan diplomasi maritim yang tercantum dalam empat pilar, pelaksanaan pengembangan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan diplomasi maritim atau hubungan antar negara di bidang maritim.
- c. BAB III: Bab ini merupakan bagian untuk menganalisis, menjelaskan dan mengevaluasi dampak kebijakan diplomasi maritim Indonesia dalam pencapaian PMD.
- d. BAB IV: Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yaitu berupa evaluasi terhadap

keberjalanan visi PMD dan juga berisi evaluasi dalam pembuatan penelitian serta saran-saran yang ditujukan bagi penelitian berikutnya.